

MANAJEMEN STRATEGI PENGELOLAAN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA PASCA RELOKASI DI BENTENG PANCASILA OLEH DISPERINDAG KOTA MOJOKERTO

Claudio Diana Anggreni

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Claudiodiana48@gmail.com

Dra. Meirinawati, M.AP

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
meirinawati@yahoo.co.id

Abstrak

Keberadaan PKL mengganggu sejumlah aktivitas dan fungsi pada ruang publik terutama di alun-alun dan di Joko Sambang Kota Mojokerto. Untuk itu Pemerintah Kota Mojokerto melakukan relokasi PKL Alun-alun dan Joko Sambang di Benteng Pancasila. Namun PKL perlu pengelolaan usaha dengan baik dalam mengelola tempat baru yang digunakan untuk berdagang pasca relokasi. Dalam hal ini Disperindag turut serta dalam pengelolaan usaha pedagang kaki lima di Benteng Pancasila. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis manajemen strategi pengelolaan usaha pedagang kaki lima pasca relokasi di Benteng Pancasila oleh Disperindag Kota Mojokerto. Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitiannya menggunakan teori manajemen strategi menurut Suyanto (2007) yang meliputi visi misi, analisis lingkungan eksternal, analisis lingkungan internal, penetapan tujuan dan sasaran, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi dan pengendalian dengan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi dokumentasi, dan *observasi*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Disperindag Kota Mojokerto telah melakukan upaya dalam manajemen strategi pengelolaan usaha pedagang kaki lima pasca relokasi di Benteng Pancasila Kota Mojokerto dengan baik. Disperindag menggunakan pendekatan sosialisai, bimbingan, pembinaan, dan penertiban.

Kata Kunci : Manajemen, Strategi, Pedagang

Abstract

The existence of street vendors disrupts a number of activities and functions in public spaces, especially in the square and in Joko Sambang, Mojokerto City. For this reason, the City Government of Mojokerto relocated the PKL Alun-alun and Joko Sambang at the Pancasila Fortress. But street vendors need good business management in managing new places that are used to trade post-relocation. In this case the Ministry of Industry and Trade participated in the management of the street vendor business at Benteng Pancasila. The purpose of this study was to analyze the management of the management strategy of the street vendor business after relocation in Benteng Pancasila by the Ministry of Industry and Trade of the City of Mojokerto. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. The focus of his research uses strategy management theory according to Suyanto (2007) which includes mission vision, external environment analysis, internal environment analysis, setting goals and objectives, strategy formulation, strategy implementation, evaluation and control with *Purposive Sampling* techniques. The technique of collecting data uses interviews, documentation studies, and observations. The results of the study show that the Disperindag of the City of Mojokerto has made efforts in the management of the business strategy for the management of street vendors after the relocation in the Pancasila Fortress of Mojokerto City properly. Disperindag uses a socialization, guidance, guidance and control approach.

Keywords : Management, Strategy, Trader

PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia mempunyai hakikat yaitu pembangunan manusia seutuhnya dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan pedoman. Dilaksanakan secara merata diseluruh tanah air dan diperuntukan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai perbaikan taraf hidup yang berkeadilan sosial sesuai dengan tujuan, cita-cita dan kemerdekaan bangsa Indonesia, seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV. Tikson (2005) berpendapat bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Kartasasmita dalam Riyadi (2005) menyatakan pengertian lebih sederhana mengenai pembangunan yang mengatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan usaha kegiatan yang dilaksanakan secara sadar terencana, dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kearah perubahan-perubahan yang lebih baik, yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata dan adil bagi rakyat. Salah satu bukti pelaksanaan pembangunan nasional adalah adanya pengelolaan di bidang ekonomi yaitu perdagangan. Tingkat pertumbuhan kerja yang terus meningkat, baik di desa ataupun di kota besar, sering tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan. Dari sinilah awal adanya kecenderungan, bahwa mereka yang tidak tertampung di sektor formal terpaksa berpartisipasi pada sektor informal yang biasanya bergerak dalam bidang sektor jasa dan perdagangan. Pihak yang terlibat dalam perdagangan salah satunya adalah pedagang.

Pedagang adalah orang yang melakukan kegiatan perdagangan. Kelompok pedagang kaki lima sebagai bagian dari usaha sektor informal yang memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja. Alma (2001) berpendapat bahwa sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Tetapi akan menyedatkan bila disebutkan perusahaan berskala kecil, karena sektor informal dianggap sebagai suatu manifestasi situasi pertumbuhan kesempatan kerja di negara sedang berkembang, karena itu mereka yang memasuki kegiatan berskala kecil ini di kota, terutama bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan daripada memperoleh keuntungan. Karena mereka yang terlibat dalam sektor ini pada umumnya miskin, berpendidikan sangat rendah, tidak terampil dan kebanyakan para migran, jelaslah bahwa mereka bukanlah kapitalis yang mencari investasi yang menguntungkan dan juga bukan pengusaha seperti yang dikenal pada umumnya. Keberadaan PKL disini sangat menarik untuk dibahas satu persatu. Baik ditinjau secara ekonomi maupun secara tata kota. Secara

ekonomi keberadaan PKL relatif membantu pemerintah mengurangi pengangguran. Pemerintah tidak perlu menyediakan lapangan kerja yang cukup banyak. Masyarakat yang tidak tertampung dalam dunia kerja formal dapat memilih pekerjaan dengan berjualan sebagai kaki lima. Dengan adanya mata pencaharian ini maka pendapatan keluarga dapat terpenuhi. Lebih jauh manfaat secara ekonomi ini bisa berdampak pada keamanan kota. Masyarakat yang sudah bekerja akan relatif kecil kemungkinan untuk melakukan tindakan kriminal sebagai upaya memenuhi kebutuhannya. Pekerjaan pedagang kaki lima merupakan jawaban terakhir yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang berangkaian dengan migrasi dari desa ke kota yang besar, pertumbuhan penduduk yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat di sektor industri, dan penyerapan teknologi, serta keberadaan tenaga kerja yang berlebihan.

Namun demikian keberadaan PKL juga berdampak negatif. Terutama dari sisi tata kota atau wilayah. PKL biasanya menggelar dagangannya di pinggir jalan atau trotoar. Sedangkan fungsi dari trotoar adalah sebagai tempat pejalan kaki. Dengan adanya PKL maka fungsi jalan untuk pejalan kaki menjadi terganggu. PKL juga kadang berada di sekitar keramaian seperti Alun-alun kota. Fungsi alun alun kota sebagai tempat rekreasi keluarga sekaligus ruang terbuka hijau menjadi berkurang keindahannya dengan adanya PKL yang tidak tertib dan segala unsur kotoran yang dihasilkan. Sehingga keberadaan PKL dapat mengganggu keindahan tata kota. Keberadaan PKL yang berkembang pesat dapat mengganggu sejumlah aktivitas dan fungsi pada ruang-ruang publik semakin tidak nyaman serta dapat mengganggu keindahan kota. Kesan kumuh, liar, dan merusak keindahan sudah melekat pada usaha mikro ini. Bukan tanpa alasan para PKL menempati lokasi yang kurang strategis di kota untuk memenuhi kebutuhan warga kota dengan menjual barang murah yang cenderung bergerak mendekati konsumen.

Kondisi Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut terjadi di beberapa kota di Indonesia, salah satunya di Kota Mojokerto. Seperti halnya pemerintah kota lain, Pemerintah Kota Mojokerto juga memiliki peraturan daerah yang mengatur keberadaan PKL di kota, yaitu Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2005 tentang penataan dan pembinaan kegiatan PKL Peraturan tersebut melarang PKL berada di lingkungan trotoar, Alun-alun kota dan fasilitas umum lainnya. Berdasarkan aturan Perda tersebut serta mempertimbangkan adanya permasalahan tata ruang tersebut maka diperlukan upaya relokasi PKL.

Relokasi PKL merupakan kebijakan untuk menjadikan ruang-ruang publik kota Mojokerto berfungsi sebagaimana mestinya seperti trotoar, badan jalan, dan taman kota. Kebijakan tersebut diambil

karena adanya inisiatif pemerintah kota Mojokerto untuk bersikap tegas dalam menentukan lokasi bagi sektor informal PKL yang tertib dan nyaman. Pemindahan atau relokasi PKL ke lokasi yang lebih kondusif untuk menciptakan lingkungan yang nyaman di perkotaan menjadi salah satu kebijakan yang dilakukan oleh beberapa kota besar yang mengalami masalah dengan PKL. Seperti yang diketahui bahwa Alun-alun Kota Mojokerto merupakan salah satu tempat PKL terbanyak di Kota Mojokerto setelah Joko Sambang. Pemkot Mojokerto ingin wilayah Alun-alun ini bisa steril bebas PKL dan akan direnovasi sebagai lingkungan hijau atau taman kota. Hal ini diperkuat dalam sebuah berita bahwa setelah PKL Alun-alun direlokasi ke kawasan Benpas ini, menurut Walikota Abdul Gani Suhartono, nantinya Alun-alun akan ditata ulang dan dijadikan taman bernuansa Mojopahit dan fasilitas umum (fasum) bagi warga.

Relokasi pedagang yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Mojokerto fokus pada PKL yang berasal dari Jalan Joko Sambang dan Alun-alun. Kedua lokasi tersebut dinilai tidak strategis dan mengurangi nilai keindahan kota. Pemerintah Kota Mojokerto telah membahas permasalahan yang ada di dua tempat tersebut. Dan upaya relokasi menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan persoalan ini. Instansi yang terkait dengan relokasi PKL tersebut yaitu Disperindag Kota Mojokerto. Jumlah PKL yang ada disana kurang lebih sekitar 125 PKL Jalan Joko Sambang akan menempati lapak dan tenda sementara yang disediakan oleh pemerintah daerah di kawasan Benteng Pancasila. Secara bertahap, 248 PKL Alun-alun juga dipindahkan ke Kawasan Benteng Pancasila. Jalan Benteng Pancasila, Kecamatan Magersari merupakan nama jalan yang dulu tempatnya hanya lahan kosong yang dikenal dengan sebutan Benpas.

Pemerintah kota Mojokerto berharap agar tempat baru yang dijadikan relokasi PKL ini dapat menjadi sentra aktivitas sektor informal yang dapat menjadi daya tarik perdagangan berbasis lokal, sehingga dapat mengangkat perekonomian di kota Mojokerto melalui kegiatan ekonomi skala kecil oleh para PKL. Berkumpulnya PKL Alun-Alun kota Mojokerto dan Joko Sambang dalam satu tempat yaitu di Benteng Pancasila kota Mojokerto akan membentuk sebuah sentra atau pusat aktivitas sektor informal yang dapat mendukung pengembangan wilayah dan juga dapat menjadi salah satu icon di Benteng Pancasila Kota Mojokerto. Namun PKL perlu pengelolaan usaha dengan baik dalam mengelola tempat baru yang digunakan untuk berdagang. Melihat begitu pentingnya keberhasilan perdagangan di Benteng Pancasila pasca relokasi guna membantu pedagang kaki lima dalam mengelola usaha pedagang kaki lima supaya dapat terlaksana dengan baik, Dinas Perindustrian dan

Perdagangan turut serta dalam pengelolaan usaha pedagang kaki lima di Benteng Pancasila.

Strategi yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengelola usaha pedagang kaki lima inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana Pemkot mewujudkan agar pengelolaan usaha pedagang kaki lima pasca relokasi yang baru itu dapat terlaksana dengan baik dan dapat mendapatkan banyak pengunjung. Terkait hal tersebut maka akan digali lebih lanjut strategi manajemen yang diterapkan Disperindag Kota Mojokerto, sehingga pada penelitian ini mengambil judul “Manajemen Strategi Pengelolaan Usaha Pedagang Kaki Lima pasca Relokasi di Benteng Pancasila oleh Disperindag Kota Mojokerto”.

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitiannya menggunakan teori manajemen strategi menurut Suyanto (2007) yang meliputi visi misi, analisis lingkungan eksternal, analisis lingkungan internal, penetapan tujuan dan sasaran, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi dan pengendalian dengan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi dokumentasi, dan *observasi*. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2011) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dapat dilakukan analisis manajemen strategi pengelolaan usaha pedagang kaki lima pasca relokasi di Benteng Pancasila oleh Disperindag Kota Mojokerto dengan menggunakan teori Suyanto untuk mengetahui pengelolaan usaha pedagang kaki lima pasca relokasi di Benteng Pancasila Kota Mojokerto. Teori manajemen strategi menurut Suyanto terbagi menjadi tujuh dimensi yang meliputi visi misi, analisis lingkungan eksternal, analisis lingkungan internal, penetapan tujuan dan sasaran, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi dan pengendalian. Dan berikut ini penjelasannya:

1. Mendefinisikan visi, misi, bisnis dan tanggung jawab sosial.

Visi merupakan tujuan serta gambaran masa depan yang mana ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto untuk mewujudkan apa yang akan dicapai untuk keberhasilan yang dilaksanakan. Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto adalah “Terwujudnya Industri Dan Perdagangan Yang Modern, Berdaya Saing dan

Mandiri” yang merupakan hasil refleksi dan sekaligus proyeksi kedepan tentang arah yang hendak dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto sebagai organisasi penyelenggara pembangunan dan pelayanan publik Kota Mojokerto supaya industri dan perdagangan yang modern, berdaya saing, dan mandiri serta dapat terwujud dengan mudah.

Misi perusahaan adalah hal yang sangat diperlukan dalam organisasi. Dengan adanya misi perusahaan organisasi menjadi lebih tertata. Misi perusahaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terlepas satu sama lain. Misi mempunyai pengertian sebagai suatu turunan dari rumusan yang telah ditetapkan. Misi mempunyai suatu tujuan tertentu yang berbeda dengan perusahaan satu dan perusahaan yang lainnya. Misi merupakan uraian hal-hal karakteristik dari produk, maupun pasar yang dimasuki serta teknologi yang akan digunakan. Adanya misi pada organisasi, maka organisasi tidak akan asal dalam melaksanakan program yang akan diterapkan dikemudian hari. Guna mencapai visi yang telah dijelaskan diatas, maka telah ditetapkan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto yaitu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan industri yang berorientasi pasar dan mampu mengakses pasar, baik domestik maupun luar negeri .
- b. Mewujudkan perdagangan yang mampu menyerap hasil industri yang menguasai pangsa pasar baik dalam maupun luar negeri.

2. Menganalisis lingkungan eksternal.

Dalam pengamatan analisis lingkungan eksternal ini dibagi menjadi dua jenis yaitu aspek peluang dan ancaman. Peluang yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto yaitu bahwa Pengelolaan Usaha Pedagang Kaki Lima pasca Relokasi di Benteng Pancasila tersebut dapat dicontoh dan diterapkan oleh daerah lain. Selain peluang tersebut, peluang lain dalam pengelolaan pedagang kaki lima pasca relokasi di Benteng Pancasila adalah memunculkan pusat keramaian yang baru di Kota Mojokerto, dengan harapan pertumbuhan ekonomi di Kota Mojokerto bisa menyebar dan merata. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto mempunyai strategi khusus yaitu dengan dibangunnya Taman Benteng Pancasila guna untuk meramaikan pusat perdagangan pedagang kaki lima di kawasan Benteng Pancasila.

Ancaman yang harus dihadapi oleh pedagang kaki lima maupun pihak Disperindag yaitu telah dibuka mall di dekat kawasan Benteng Pancasila yang letaknya hanya beberapa meter saja dan dinamakan dengan Sunrise Mall. Selain ancaman tersebut, masih terdapat lagi ancaman lain yaitu proses adaptasi para pedagang karena lokasi di kawasan Benteng Pancasila merupakan lokasi baru bagi pedagang kaki lima khususnya pedagang yang berasal dari Alun-alun dan Joko

Sambang, dan perlu waktu untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa dikawasan Benteng Pancasila terdapat pusat perbelanjaan baru yang merupakan hasil relokasi pedagang kaki lima baik yang berada di Alun-alun maupun Joko Sambang dan juga dan adanya sistem belanja online (*online shop*) dikalangan masyarakat.

3. Analisis lingkungan internal.

Struktur Organisasi merupakan salah satu kekuatan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto. Selain struktur organisasi, kekuatan lain yang dimiliki oleh adalah Disperindag Kota Mojokerto membuat aturan-aturan yang dituangkan dalam Perwali Kota Mojokerto yang mengatur tentang tata cara, kewajiban dan hak dalam mengelola usaha pedagang kaki lima di Benteng Pancasila, sehingga Disperindag Kota Mojokerto mempunyai dasar yang kuat dalam mengelola usaha pedagang kaki lima, dan apabila ada yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi tegas yaitu tidak diperbolehkan berjualan di area Benteng Pancasila.

Kekuatan lain yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto adalah budaya kerjanya. Budaya merupakan pola keyakinan, pengharapan, dan nilai-nilai yang dibagikan oleh anggota organisasi. Di dalam tempat relokasi jualan pedagang kaki lima baru yaitu di Benteng Pancasila, harga yang ditawarkan penjualpun terjangkau, sehingga masyarakat bisa membeli barang-barang dengan harga yang lebih murah dibanding dengan tempat lain. Jadi, berdasarkan beberapa keterangan yang telah dipaparkan tersebut maka dapat diketahui bahwa kekuatan yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dalam Pengelolaan Usaha Pedagang Kaki Lima pasca Relokasi adalah Kebersihan toilet, adanya restrukturisasi yang sebelumnya Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto sekarang menjadi Dinas Prindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto.

Dalam menentukan strategi pengelolaan usaha PKL di Benteng Pancasila, Disperindag Kota Mojokerto tentunya ada yang namanya kelemahan, kelemahan lain seperti masih adanya anggota pedagang kaki lima yang tidak patuh terhadap peraturan terkait menjaga kebersihan lingkungan, rendahnya pengetahuan dan partisipasi pedagang dalam mengelola kebersihan dilingkungan area dagang, hal itu dibuktikan dengan adanya masih banyak sampah yang berserakan didalam area perbelanjaan.

4. Memilih tujuan dan sasaran bisnis.

Dalam hal memilih tujuan pihak disperindag yang pertama yaitu menjadikan kawasan Benteng pancasila sebagai pusat perbelanjaan ditengah kota yang ramai dan tertib dan juga sebagai salah satu *icon* yang bisa dikunjungi di Kota Mojokerto. Yang kedua menertibkan

dan mengembangkan usaha pedagang kaki lima supaya lebih maju dan berkembang pesat dari waktu ke waktu. Sedangkan sasaran bisnis pedagang kaki lima yaitu masyarakat, dan pihak pedagang memberikan harga yang relative murah supaya sasaran bisnis mereka dapat tercapai dengan baik.

5. Merumuskan dan mengembangkan strategi bisnis.

Strategi bisnis yang Disperindag lakukan sejalan dengan tupoksi disperindag selain memberikan lokasi yang layak untuk pedagang dan masyarakat mengadakan jual beli yaitu memberikan pembinaan kepada pedagang kaki lima tersebut supaya dagangan mereka dapat meningkat dengan baik dengan cara mengelola usaha tempat mereka berdagang terlebih dahulu, karena tempat yang nyaman merupakan alasan pertama masyarakat berbelanja.

6. Mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan.

Dalam mewujudkan strategi pengelolaan PKL agar berhasil dan terlaksana dengan baik Disperindag selalu mengadakan sosialisasi, bimbingan, pembinaan, menertibkan disertai evaluasi dalam kegiatan ini. Pembinaan pada PKL yaitu untuk meningkatkan permodalan atau penghasilan dalam berdagang. Dengan pengelolaan usaha pedagang kaki lima pasca relokasi seperti pelaksanaan kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Benteng Pancasila, Disperindag sudah berupaya untuk memberdayakan pedagang kaki lima dengan berusaha mengelola dan menata usaha PKL yang memungkinkan pedagang dapat berdagang di tempat yang nyaman dan aman tanpa mengganggu ketertiban dan kenyamanan kota. Pengelolaan usaha pedagang kaki lima pasca relokasi ini juga dapat membantu para pedagang untuk dapat berkembang agar dapat bersaing dengan usaha formal yang lebih besar.

7. Mengumpulkan umpan balik serta menguji pengendalian.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto melakukan evaluasi dengan cara periodik yaitu setiap triwulan atau tiga bulan sekali. Evaluasi dilakukan oleh Kepala Bidang Perdagangan, Sekretaris, Seksi Distribusi, Seksi Bina Usaha, Seksi Perlindungan Konsumen serta Staff Bidang Perdagangan. Kemudian yang menjadi bahan evaluasi adalah tingkat kenyamanan, keamanan, kebersihan, sarana prasarana, penghasilan atau pendapatan pedagang kaki lima dan juga setiap kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama tiga bulan tersebut, termasuk acara *car free day*. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto menilai pengelolaan PKL pasca relokasi sejauh ini telah berhasil, dibuktikan dengan semakin ramainya lokasi di sekitar kawasan benteng pancasila, ini sejalan dengan peningkatan pendapatan PKL bahwa pendapatan pedagang kaki lima mengalami peningkatan setelah

dikelola oleh Disperindag Kota Mojokerto pasca relokasi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai Manajemen Strategi Pengelolaan Usaha Pedagang Kaki Lima Pasca Relokasi di Benteng Pancasila oleh Disperindag Kota Mojokerto dari pemaparan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan benar-benar berusaha keras dalam melaksanakan Pengelolaan Usaha Pedagang Kaki Lima, guna meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan pedagang kaki lima yang ada di Kota Mojokerto khususnya kawasan Benteng Pancasila. Walaupun masih ada beberapa kekurangan atau kendala yang harus diselesaikan. Hal tersebut dibuktikan dalam penjelasan berikut ini:

Dalam proses pengamatan lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto telah membuahkan hasil, yaitu dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki berupa struktur organisasi yang lebih spesifik lagi dan lebih fokus pada bagiannya masing-masing, kemudian juga didukung dengan komitmen staf yang bertugas dalam pengelolaan usaha PKL yang selalu memegang prinsip untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Selain itu juga diperkuat dengan Disperindag Kota Mojokerto membuat aturan-aturan yang dituangkan dalam Perwali Kota Mojokerto yang mengatur tentang tata cara, kewajiban dan hak dalam mengelola usaha pedagang kaki lima di Benteng Pancasila, sehingga Disperindag Kota Mojokerto mempunyai dasar yang kuat dalam mengelola usaha pedagang kaki lima.

Sedangkan kelemahan yang dimiliki adalah seperti masih adanya anggota pedagang kaki lima yang tidak patuh terhadap peraturan terkait menjaga kebersihan lingkungan, rendahnya pengetahuan dan partisipasi pedagang dalam mengelola kebersihan dilingkungan area dagang, hal itu dibuktikan dengan adanya masih banyak sampah yang berserakan didalam area perbelanjaan. Kemudian dengan pengamatan lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dapat diketahui ancaman berupa adanya sunrise mall yang berdiri beberapa meter saja dari kawasan perbelanjaan Benteng Pancasila. Selain itu, ancaman yang terjadi adalah adanya perbelanjaan online (*online shop*) dalam masyarakat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dalam melaksanakan pengelolaan usaha pedagang kaki lima pasca relokasi memiliki peluang yaitu strategi pengelolaan usaha pedagang kaki lima pasca relokasi di Benteng Pancasila tersebut dapat dijadikan sebagai strategi percontohan baik lokal maupun nasional yang dapat diterapkan oleh daerah lain.

Dalam hal memilih tujuan dan sasaran bisnis pihak disperindag yang pertama yaitu menjadikan kawasan Benteng pancasila sebagai pusat perbelanjaan ditengah kota yang ramai dan tertib dan juga sebagai salah satu *icon* yang bisa dikunjungi di Kota Mojokerto. Yang kedua menertibkan dan mengembangkan usaha pedagang kaki lima supaya lebih maju dan berkembang pesat dari waktu ke waktu. Kemudian untuk sasaran bisnis, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto sasarannya yaitu pada masyarakat. Akan tetapi, dalam perumusan strategi tersebut Disperindag merumuskan strategi pengelolaan pedagang kaki lima dengan menggandeng beberapa instansi terkait antara lain: Polresta Mojokerto, Kodim Mojokerto, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Perwakilan pedagang kaki lima untuk menampung saran dan masukan dari mereka.

Kemudian untuk implementasi pengelolaan usaha pedagang kaki lima pasca relokasi itu sendiri sudah dapat dikatakan baik walaupun masih ada kendala yang dialami.

Dan indikator yang terakhir adalah evaluasi dan pengendalian. Dengan adanya proses evaluasi maka dapat diidentifikasi masalah atau kendala apa yang muncul dan dapat segera ditemukan penyelesaiannya. Proses evaluasi terkait pengelolaan usaha pedagang kaki lima pasca relokasi ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto setiap tiga bulan sekali. Proses evaluasi tersebut yang dilakukan oleh Kepala Bidang Perdagangan, Sekretaris, Seksi Distribusi, Seksi Bina Usaha, Seksi Perlindungan Konsumen serta Staff Bidang Perdagangan.

Saran

Dalam manajemen strategi Pengelolaan Usaha Pedagang Kaki Lima Pasca Relokasi di Benteng Pancasila oleh Disperindag memang sudah dapat dikatakan baik, meskipun masih terdapat berbagai permasalahan dan kekurangan yang harus segera diselesaikan. Sehingga peneliti memberikan saran yang bersifat membangun dan mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan atau masukan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dalam meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan pedagang kaki lima yang ada di Kota Mojokerto khususnya kawasan Benteng Pancasila, saran tersebut antara lain:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto lebih mengedepankan lagi pendekatan kekeluargaan dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi lebih terhadap pedagang tentang arti kebersihan dan ketertiban demi kenyamanan bersama dan tercapainya tujuan bersama.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto bisa memberlakukan dan menerapkan sistem reward dan punishment bagi pedagang kaki

lima yang selalu menjaga kebersihan lingkungan ataupun yang tidak menjaga kebersihan lingkungan.

3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto seharusnya membuat laporan hasil pendapatan pedagang kaki lima setiap bulan guna menjadi bahan acuan dalam tahap proses evaluasi selanjutnya.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto seharusnya membuat strategi untuk mempromosikan Taman Benteng Pancasila supaya selalu ramai pengunjung dengan cara memposting lewat media sosial seperti Instagram, Facebook, maupun lainnya, dan juga membangun area bermain lebih banyak di Taman Benteng Pancasila.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto seharusnya melakukan bimbingan atau sosialisasi tentang gadget kepada pedagang kaki lima supaya PKL dapat memperjual belikan dagangannya dengan sistem olshop guna meningkatkan pendapatan PKL.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto seharusnya membuat visi dan misi lebih khusus untuk pedagang kaki lima di Benteng Pancasila supaya tujuan lebih terarah secara spesifik.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal diantaranya:

1. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA,
2. Dra. Meirinawati, M.AP selaku dosen pembimbing
3. Fitrotun Niswah, S.AP, M.AP dan Trena Aktiva Oktariyanda, S.AP., selaku dosen penguji
4. M. Farid Ma'ruf S.Sos, M.AP. yang telah membimbing dan menelaah jurnal yang ditulis peneliti.
5. Dan pihak-pihak lainnya yang memberi dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari. 2001. *Kewirausahaan*. Bandung: Bima Cipta
- Amiruddi, Mohammad Faisal Rizky. 2016. *Manajemen Strategi Paguyuban Wahana Karya Aneka Boga dalam Mengelola Ketertiban Pedagang Kaki*

- Lima (PKL) Di Ruko Manyar Indah Kelurahan Barata Jaya Surabaya*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto 2018
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Pemerintah Kota Mojokerto. 2005. *Perda Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2005 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 19 Tahun 2012*. Mojokerto
- Riyadi dan Bratakusumah. D.S, 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suyanto, M. 2007. *Strategic Management: Global Most Admired Companies*. Yogyakarta : Andi.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Tikson, Deddy T, *Indikator-indikator Pembangunan Ekonomi*. <http://ecozon.html>. Diakses pada 10 Mei 2018 pukul 18.40 WIB
- Undang-Undang Dasar 1945.
(<https://www.scribd.com/doc/297868628/Pengertian-Pedagang>)
(<http://www.satu jurnal.com/2012/12/ratusan-pkl-alon-alon-digeser-ke-benpas.html?m=1>)